

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2019



TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis, dimana rencana kerja tahun 2019 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan selama Tahun 2019.

Dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Rencana Kerja ini memuat kegiatan yang diharapkan menjadi solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan senantiasa diberikan kelancaran serta memberikan dampak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	4
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA	4
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	19
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL.....	18
2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	29
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD	30
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	39
BAB IV PENUTUP	41
LAMPIRAN	

B B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu (untuk periode satu tahun). Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 juga menjabarkan visi dan misi serta arah pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra).

Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini disusun berdasarkan pengolahan data dan informasi terkait pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, dan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan sebagai landasan hukumnya, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja

Adapun maksud Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2019 ini disusun adalah untuk menentukan arah pelaksanaan pembangunan serta sebagai acuan atau pedoman dalam perencanaan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun serta menunjukkan gambaran umum atas apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Humbang Hasundutan serta target yang hendak dicapai pada tahun tersebut.

b. Tujuan Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Humbang Hasundutan Tahun 2019 bertujuan untuk :

- Mewujudkan visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan ke dalam rencana kegiatan pembangunan khususnya dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara sistematis dan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur berdasarkan indikator serta target capaian kinerja yang telah ditentukan
- Meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran renja skpd
- 3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra

Pada Tahun 2017 Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan 1 urusan wajib yaitu urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan capaian sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana

- Terselenggaranya pelayanan KB kontrasepsi jangka panjang (MOW/MOP) bagi 110 PUS dari 10 kecamatan. terdiri dari : Pelayanan Kontap MOW 100 akseptor dan MOP 10 akseptor yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2017 di RSUD Doloksanggul.
- Terselenggaranya Penyuluhan dan Pelayanan KB bagi 750 Pasangan Usia Subur (PUS) di 10 kecamatan yaitu: Pemasangan Implant 300 Akseptor, Pemasangan IUD 450 Akseptor.
- Terlaksananya Orientasi bagi bidan R/R Klinik (Puskesmas) pada tanggal 20 Maret 2017 di Hiotel Martabe Doloksanggul sebanyak 15 Orang sehingga pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan keluarga berencanan di Fasyankes dapat terlaksana dengan baik.
- Terlaksananya pelayanan Keluarga Berencana melalui Tium KB Keliling khusus untuk pelayanan kepada Akseptor Implan yang sudah habis masa pemakaiannya yaitu sebanyak 400 Akseptor Implant di 10 Kecamatan.

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Terlaksananya Sosialisasi Kesehatan reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Bagi remaja yang dilaksanakan di 10 Kecamatan.
- Tersedianys Materi dan Media KIE KRR dengan Mendirikan Billboard pada 10 kecamatan dan Memberikan Sticker, Leaflet dan Poster kepada camat maupun PLKB.
- Terlaksananya pembinaan terhadap kelompok PIK R/M yang menghadirkan kelompok PIK R/M dari 10 kecamatan.
- Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKR dengan Menghadirkan Para Kelompok BKR dari 10 Kecamatan

3. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

- Terlaksananya Perlombaan Tingkat kabupaten yaitu Lomba keluarga harmonis 3 keluarga, Lomba KB lestari 10 tahun, Lomba PLKB terbaik 4 Orang, Lomba BKB terbaik 3 Kader, Lomba UPPKS terbaik 3 kelompok, lomba Bidan R/R terbaik 3 Orang, lomba PIK R/M terbaik 3 kelompok.
- Terlaksananya pembinaan BKB pada tanggal 11 Juli 2017 di Aula Hutamas dengan menghadirkan kelompok BKB dari 10 kecamatan.

- Terlaksananya pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) sebanyak 10 Kelompok yang te

4. Program Advokasi, Informasi dan Pemberdayaan PLKB

- Tersedianya Materi dan media KIE Program KB, Yaitu :
 - a.Penyuluhan Melalui media elektronik yaitu sms sebanyak 61.200 sms dengan jumlah karakter maksimal 160/sms.
 - b. Penyuluhan melalui media cetak yaitu stiker sebanyak 110 buah, leaflet sebanyak 157 buah, poster sebanyak 15 buah.
 - c.Cetak billboard sebanyak 10 unit
 - d. Cetak X banner sebanyak 30 Unit
 - e.Cetak roll banner sebanyak 30 Unit
- Terbentuknya 10 Kampung KB
- Terlaksananya pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi) Melalui Mopen (Mobil Penerangan) di 30 Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Pendataan Keluarga Baru dan pemutahiran Data system Informasi keluarga realisasi Program dan kegiatan.Termutahirkannya data 40.888 Kepala Keluarga (KK) dan terdatanya 1.288 KK yang Baru.

5. Program Pengeloan data dan Kependudukan

- Pendataan Keluarga Baru dan pemutahiran Data system Informasi keluarga realisasi Program dan kegiatan.Termutahirkannya data 40.888 Kepala Keluarga (KK) dan terdatanya 1.288 KK yang Baru.

Berdasarkan uraian diatas bahwa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah melewati target renstra untuk renja 2017 walaupun masih terdapat kegiatan yang tidak terlaksana pada renja.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Sampai 2018

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCNA

Kode	Urusan /Bidang	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Target	Target dan Realisasi Kinerja Program dan	Target Program dan				Perkiraan Realisasi Capaian Target						
						Urusan Pemerintahan	Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2016	Kegiatan Tahun Lalu 2017		Kegiatan					
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)	Perangkat Daerah Tahun 2018)	Realisasi capaian	Tingkat capaian realisasi
															Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	target renstra (%)
Daerah Program Kegiatan	Program(outcomes)	Kegiatan(output)	Tahun 2016-2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2017	(%)	Daerah Tahun 2018)	10=(5+7+9)	11						
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11						
2	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80											
2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Item)	6	2	2	2	2	6	60%					
2	8	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Air, Listrik Yang Terpenuhi(Jasa)	10	2	2	2	2	6	60%					

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	24	4	4	4	4	4	12	60%
2	8	1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan Kebersihan Kantor (Item)	106	20	21	21	22	22	62	60%
2	8	1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdistribusi Sesuai Kebutuhan (Item)	276	40	43	43	43	43	126	60%
2	8	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Item)	27	2	2	2	2	2	6	60%
2	8	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Alat Listrik dan Penerangan Kantor Yang Beroperasi Dengan Baik(item)	40	7	8	8	9	9	24	60%
2	8	1	Penyediaan Makan Minum	Jumlah Penyediaan Makan dan minum yang terpenuhi (kebutuhan)	10	2	2	2	2	2	6	60%
2	8	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	5	1	1	1	1	1	3	60%
2	8	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke daerah yang terpenuhi(kali)	890	135	154	154	154	154	443	60%
2	8	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam yang terpenuhi(kali)	2650	285	350	350	400	400	1035	60%
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan (orang)	9				3	3	3	60%

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi (%)	70							
2	8	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Item)	30	4	4	4	4	4	12	60%
2	8	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung / Kantor yang DiPelihara (Unit)	5	1	1	1	1	1	3	60%
2	8	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara(Unit)	20	1	1	1	1	1	3	60%
2	8	15	Program Keluarga Berencana	Persentase Pemahaman Masyarakat tentang isu kependudukan (persen)	60							
2	8	15	TNI Manunggal KB Kesehatan	Jumlah Akseptor KB yang Mengikuti MOW dan MOP(Pus)	360	120	120	120	120	120	360	60%
2	8	15	Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Akseptor KB(Pus)	6750	750	750	750	750	750	2250	40%
2	8	15	Pelayanan Program Kelurga Berencana melalui tim KB keliling	Jumlah Akseptor KB yang Dilayani di Fasyankes (Pus)	1200	400	400	400	400	400	1200	100%

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	15	Deteksi Dini Kanker Rahim Terintegrasi pada pelayanan KB	Persentase Akseptor KB (Pus0	300	200	200	100 PUS	100	100	300	100%
2	8	15	Pendataan Keluarga baru dan Pemuktahiran Data Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pendataan Keluarga Baru (kk)	63000	-	4800	4800	5000	5000	9800	60%
2	8	15	Orientasi Bidan RR klinik	Jumlah Pelaporan Bidan R/R Klinik (fasyankes)	60	15	15	15	15	15	15	60%
2	8	15	penyusunan Rancangan Induk Kependudukan (Grand Desain Kependudukan)	Jumlah Penyusunan Grand Design (buku)	1	-	-	-	1	1	1	100%
2	8	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Binaan Kelompok Remaja(Persen)	70							
2	8	16	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Pencegahan Pernikahan Usia Dini bagi Remaja	Persentase Pengetahuan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Peserta)	900	300	300	300	300	300	900	100%

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	16	Pengembangan Materi dan Media Komunikasi Informasi Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pengetahuan Remaja (Paket)	3	1 Paket	1	1	1	1	3	100%
2	8	16	Pembinaan Kelompok PIK R/M	Jumlah Remaja Yang Di Bina (peserta)	550	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	16	Pembinaan Kelompok BKR	Jumlah Kader Kelompok BKR Yang Terlatih (Kelompok)	240	80	80	80	80	80	240	100%
2	8	16	Pembinaan Kelompok BKB	Jumlah Kader Kelompok BKB Yang Terlatih (Kelompok)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	17	Program Pelayanan Kontrasepsi	Persentase Peserta KB aktif (persen)								
2	8	17	Pengadaan Alat/Obat side efek kontrasepsi	Jumlah dan jenis ketersediaan obat side efek ((kontrasepsi (Unit)	138	20	20	20	20	20	60	60%
2	8	17	Penyuluhan dan Pelayanan KB di Fasyankes	Jumlah Ketersediaan Alat/Obat Side Efek (peserta)	168	58	58	58	58	58	174	60%

				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kb								
2	8	31											
2	8	31		Pengadaan Bibit Kit	Jumlah Tempat Penyimpanan KIT/Alat dan Obat Kontrasepsi (unit)	65	13	13	13	13	13	39	60%
2	8	31		Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah Balai Penyuluhan (Unit)	10	1Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	5	60%
2	8	31		Operasional Balai Penyuluhan KB	Jumlah balai operasional Penyuluhan KB (Unit)	30	5	5	5	5	5	15	60%
2	8	31		Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi	Jumlah Biaya Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas pelayanan KB (Faskes)	80	15	15	15	15	15	45	60%
2	8	31		Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokasi	Jumlah Kendaraan Distribusi Alokasi (Unit)	1			1	1	1	1	60%

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	31	Pengadaan Alat/Obat side efek kontrasepsi	Jumlah Alat dan Obat Side Efek Kontrasepsi (Unit)	25	5	5	5	5	5	15	60%
2	8	31	Pertemuan Kelompok Kerja Dikampung KB	Jumlah Pertemuan Kerja Dikampung KB(kampung KB)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	31	Operasional Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB	Jumlah Biaya Operasional Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB (Kampung KB)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	31	Lokarya mini tingkat desa dan kecamatan di kampung KB	Jumlah Lokak karya Mini Tingkat Dea Dan Kecamatan Di Kampung KB(Kampung KB)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	31	Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina	Jumlah Pertemuan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan Tribina(Kampung KB)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	31	Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Jumlah Kunjungan PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (peserta)	1230	308	308	308	308	308	924	60%
2	8	31	Manajemen BKOB	Persentase Penyerapan BOKB	100%	1 Keg	1 Keg	1 Keg	100%	1 Keg	3 Kegiatan	60%

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	31	Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan	Jumlah Media KIE Kecamatan (jenis)	20	5	5	5	5	5	15	60%
2	8	33	Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Persentase Penguatan Kelembagaan keluarga kecil berkualitas(persen)	80							
2	8	33	Pembinaan Kelompok BKB	Jumlah Pembinaan Kader BKB (Kelompok)	30	10	10	10	10	10	10	100%
2	8	19	Program Promosi Kesehatan Ibu ,Bayi, dan Anak melalui Kelompok kegiatan Dimasyarakat	Persentase Promosi Kesehatan Ibu, ,bayi dan anak melalui kegiatan di masyarakat (persen)	80							
2	8	19	Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)	Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Harganas (Kategori Lomba)	35	7	7	7	7	7	35	60%
2	8	19	Dukungan ATTG bagi Kelompok UPPKS	Jumlah UPPKS yang aktif(kelompok)	54	10	10	10	10	10	30	60%
3	8	23	Program Penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	Persentase Penyiapan tenaga pendampingkelompok bina keluarga								

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	8	23	Pengembangan Lansia Tangguh dan Rentan	Jumlah Kader BKL yang di bina (Kelompok)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	35	Program Advokasi , Informasi dan Pemerdayaan PLKB	Meningkatnya Informasi dan Pemerdayaan PLKB								
2	8	35	Penyuluhan dan Promosi KB melalui Media Massa dan Media Luar Ruang	Jumlah Penyuluhan Promosi KB (kegiatan)	3	1	1	1	1	1	30	100%
2	8	35	Pembentukan Kampung KB	Jumlah Pembentukan Kmapung KB (Kampung kb)	50	10	10	10	10	10	30 Desa	60%
2	8	35	Operasional KIE dan Pelaporan Pengendalian Penduduk Oleh PLKB	Jumlah Media KIE Kecamatan (kali)	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	35	Pelayanan KIE melalui Mopen	Jumlah Penyuluhan Program Pengendalian Penduduk dan KB Melalui Sarana Mobil	30	10	10	10	10	10	30	100%
2	8	6	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Laporan Kinerja Keuangan(persen)	60							
2	8	6	Penyusunana Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang di Susun Tepat Waktu (Dokumen)	5	-	-	1	100%	1	1	30%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

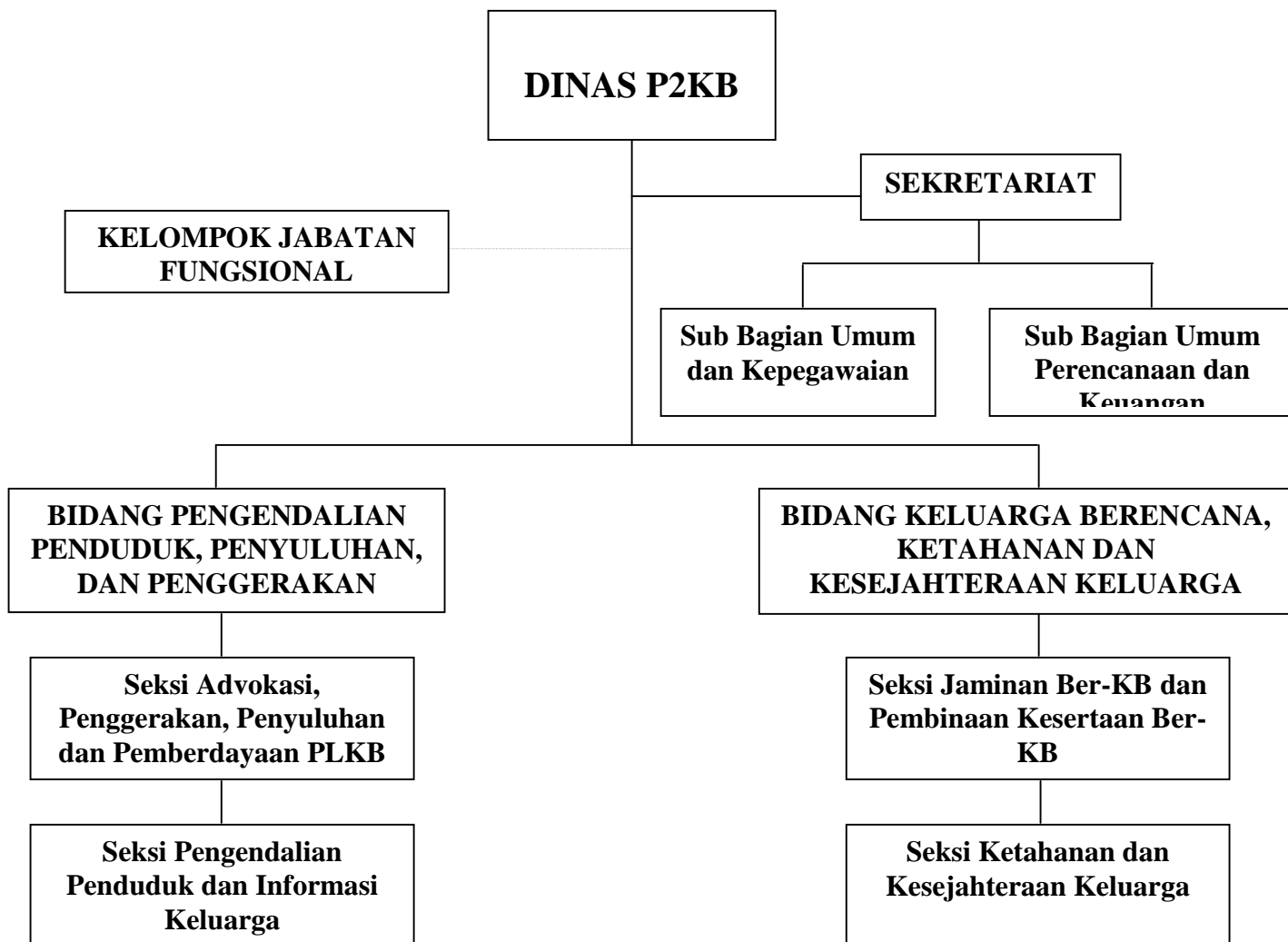
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Sebagai berikut :

1. Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
5. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
6. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
7. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
8. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB
9. Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
10. Pelaksanaan pelayanan KB
11. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
12. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
13. Pembinaan kelompok jabatan fungsional

Sesuai dengan fungsi tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan membuat tolak ukur kinerja sesuai pelayanan dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan dan bidang Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Indikator tersebut akan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.3 Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 tahun 2016 tentang Pe,mbentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perangkat daerah sebagai sebagai unsur pelaksana penye;lenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Brencana :



Dalam penyelenggaraan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana terdapat permasalahan yang menghambat tercapainya target kinerja pelaksanaan program KB yaitu minimnya tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa PLKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Secara ideal, di setiap 2 (dua) desa/kelurahan minimal tersedia satu orang PLKB dengan memperhatikan aspek demografi (jumlah kepala keluarga), aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan), dan aspek geografi (luas wilayah dan daerah kepulauan).

Kabupaten Humbang Hasundutan hanya memiliki 20 orang PLKB dimana 5 (Lima) orang merupakan PLKB PNS BKKBN, PLKB Nota Dinas sebanyak 9 (Sembilan) orang , dan PLKB TKS sebanyak 6 (orang) , Sehingga rasio PLKB yaitu 1 orang membina 8 desa/kelurahan. Ini menyebabkan

frekwensi penyuluhan dan pembinaan KB dan KS sangat terbatas. Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB.

Selain itu, pembinaan kesertaan KB melalui penyuluhan dan pelayanan KB yang berkesinambungan sangat diperlukan dan tetap menjadi prioritas. Ini ditujukan untuk mengurangi cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tapi belum terpenuhi (unmet need) yang disebabkan karena letak atau kondisi wilayah yang sulit dijangkau dan kondisi sarana dan prasarana pelayanannya masih kurang (terbatas). Di samping itu, juga bertujuan untuk mencegah terjadinya drop out (DO) pada peserta KB tersebut sehingga pencapaian jumlah peserta KB tetap meningkat.

Pendewasaan usia pernikahan adalah salah satu tujuan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) program KB. Ini ditujukan untuk memenuhi indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No. 55/HK-010/B5/2010 yaitu mengurangi cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun. Sasaran yang ditujukan adalah kepada para remaja agar mereka memiliki peningkatan pengetahuan/pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

antangan yang dihadapi antara lain adanya sebagian masyarakat yang menganggap program KB masih tabu khususnya dalam kontrasepsi pria (MOP). Pandangan masyarakat secara adat yang menganggap banyak anak banyak rejeki yang sebenarnya tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi saat ini dimana biaya kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Selain itu, apabila suatu keluarga belum memiliki anak laki-laki sebagai penerus marga, keluarga tersebut akan berusaha terus untuk mendapatkannya.

Peluang yang dimiliki dalam meningkatkan pelayanan Kantor Keluarga Berencana antara lain adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adanya dukungan pemerintah daerah, kemajuan teknologi informasi, serta kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ke luar daerah dalam rangka meningkatkan kualitas aparatur dan membuka wawasan pemikiran.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal renja disesuaikan dengan tuntutan Visi dan Misi pemerintah kabupaten Humbang Hasundutan, Yaitu : ***"Mewujudkan Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas Unggul"*** dan untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 5 Misi sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam;
- (3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- (4) Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan;
- (5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Mengacu kepada Misi ke-2 (dua) Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu ***"Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam"***, maka dirumuskan Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut : ***Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan Untuk Mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera"***.

yang pada hakekatnya adalah mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan keluarga yang mempunyai jumlah anak ideal, sehat, berpendidikan, sejahtera, berketahanan, dan terpenuhi hak-hak reproduksinya.

Tabel 2.4
 REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019
 KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

OPD :DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.00)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	443,306,239	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	469,148,389	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi,Air ,Listrik Yang Terpenuhi(Jasa)	2	4,459,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi,Air ,Listrik Yang Terpenuhi(Jasa)	2	4,459,000	DAU
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	4	6,050,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	4	6,050,000	DAU
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan Kebersihan Kantor (item)	23	4,263,620	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan Kebersihan Kantor (Jasa)	2	4,322,736	DAU
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdistribusi Sesuai Kebutuhan (Item)	50	40,658,519	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdistribusi Sesuai Kebutuhan (Item)	50	40,600,253	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Item)	7	29,941,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Item)	7	44,401,200	DAU
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Alat Listrik dan Penerangan Kantor Yang Beroperasi Dengan Baik(item)	7	3,753,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Alat Listrik dan Penerangan Kantor Yang Beroperasi Dengan Baik(item)	7	3,753,500	DAU
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Makan dan minum yang terpenuhi (kebutuhan)	3	19,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Makan dan minum yang terpenuhi (kebutuhan)	3	19,000,000	DAU
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas P2KB	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	1	29,336,200	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas P2KB	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	1	29,337,700	DAU
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke daerah yang terpenuhi(kali)	134	200,584,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke daerah yang terpenuhi(kali)	134	200,624,000	DAU
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam yang terpenuhi(kali)	387	105,200,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam yang terpenuhi(kali)	387	105,200,000	DAU
11	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas P2KB	Jumlah laporan perangkat daerah (Dokumen)	3	10,400,000	Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas P2KB	Jumlah laporan perangkat daerah (Dokumen)	3	11,400,000	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas P2KB	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi (%)	70	127,034,119	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas P2KB	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi (%)	80	165,493,900	DAU
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Item)	4	35,059,719	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Item)	4	48,519,500	DAU
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Gedung / Kantor yang DiPelihara (Unit)	1	15,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Gedung / Kantor yang DiPelihara (Unit)	2	40,000,000	DAU
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas P2KB	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara(Unit)	4	76,974,400	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas P2KB	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara(Unit)	2	76,974,400	DAU
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur		Cakupan Aparatur Perangkat Daerah Ynag Memiliki Kompetensi DiBidangnya (%)	60	50,000,000	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur	Dinas P2KB	Cakupan Aparatur Perangkat Daerah Ynag Memiliki Kompetensi DiBidangnya (%)	80	75,000,000	DAU
1	Bimbingan Teknis dan Kaji Banding Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas P2KB	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	8	50,000,000	Bimbingan Teknis dan Kaji Banding Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas P2KB	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	8	75,000,000	DAU
5	Program Keluarga Berencana	Dinas P2KB	Persentase Pemahaman Masyarakat tentang isu kependudukan (persen)	60	58,699,800	Program Keluarga Berencana	Dinas P2KB	Rasio Pemahaman Masyarakat tentang isu kependudukan (persen)	80	421573,000	DAU
1	Implementasi Siga	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Data Mikro (KK)	5000	58,699,800	Pendataan Keluarga baru dan Pemuktahiran Data Sistem Informasi Keluarga	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Data Mikro (KK)	5000	65,818,000	DAU

6	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kelompok Binaan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (%)	70	78,455,800	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kelompok Binaan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (%)	90	61,155,800	DAU
1	Pembinaan Kelompok PIK R/M	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Remaja Yang DiBina (Peseta)	110	78,455,800	Pembinaan Kelompok PIK R/M	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Remaja Yang DiBina (Peseta)	110	61,155,800	DAU
7	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase Peserta KB (%)	67	825,425,700	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase Peserta KB (%)	80	1,887,591,500	DAU
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Peserta KB Aktif (pesertas)	1030	300,000,300	Jumlah Peserta KB Aktif (pesertas)	RSUD Doloksanggul	Rasio Akseptor KB (Akseptor)	1030	320,912,000	DAU
2	Pengadaan alat/obat side effect kontrasepsi	Dinas P2KB	Jumlah dan jenis ketersediaan obat side effect kontrasepsi (Item)	23	48,425,400	Pengadaan alat/obat side effect kontrasepsi	Dinas P2KB	Jumlah dan jenis ketersediaan obat side effect kontrasepsi (Item)	23	45,300,000	DAU
3	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Distribusi Alat Dan Obat Kontrepsi Ke Fasyuankes (Unit)	18	27,000,000	Biaya Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Distribusi Alat Dan Obat Kontrepsi Ke Fasyuankes	18	27,000,000	DAK
4	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (Unit)	6	450,000,000	Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Realisasi Kegiatan Operasional Balai Penyuluhan KB	6	450,000,000	DAK
8	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Mitra Kerja Program KKBPK	90	1,920,850,600	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri		Jumlah Mitra Kerja Program KKBPK	80	1,186,482,700	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

1	Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Mitra Kerja Program KKBPB yang Terbentuk (Peserta)	100	158,053,300	Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Mitra Kerja Program KKBPB yang Terbentuk (Peserta)	100	158,053,300	DAU
2	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBPB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah OPD yang bersinergitas untuk mendukung percepatan dan pengendalian penduduk (peserta)	200	144,449,000	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah OPD yang bersinergitas untuk mendukung percepatan dan pengendalian penduduk (peserta)	200	140-,324,000	DAU
3	Penguatan Komitmen Lintas Sektor Program KKBPB	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kecamatan yang menandatangani komitmen untuk mendukung program KKBPB (kali)	10	74,285,000	Penguatan Komitmen Lintas Sektor Program KKBPB	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kecamatan yang menandatangani komitmen untuk mendukung program KKBPB (kecamatan)	10	80,085,000	DAU
4	Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas R/R Klinik	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Fasyankes yang mengikuti pembinaa, pencatatan dan pelaporan R/R (faskes)	18	24,260,400	Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas R/R Klinik	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Fasyankes yang mengikuti pembinaa, pencatatan dan pelaporan R/R (faskes)	18	24,265,400	DAU
5	Manajemen BOKB	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Penyerapan BOKB (%)	80	120,379,500	Persentase KIE dan Persentase Penyerapan BOKB	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase KIE dan Persentase Penyerapan BOKB	80	120,379,500	DAK
6	Integritas Program KKBPB dan program Pembangunan Lainnya Di Kampung KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kampung KB di Bina(kampung KB)	10	898,400,000	Jumlah Kampung KB di Bina	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kampung KB di Bina	10	997,200,000	DAK
7	Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kunjungan PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu (Kali)	308	694,848,000	Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kunjungan PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	308	924,000,000	DAK

10	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase Kader Kelompok Ketahanan Keluarga dan UPPKS yang terlatih dan aktif (%)	90	320,495,100	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase Kader Kelompok Ketahanan Keluarga dan UPPKS yang terlatih dan aktif (%)	80	404,752,800	DAU
1	Pembinaan kader Ketahanan Keluarga	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kader Ketahanan keluarga yang terlatih BKB,BKL,BKR (Peserta)	500	233,718,800	Pengembangan Lansia Tangguh dan Rentan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kader Keelompok BKB,BKL,BKR	500	309,258,400	DAU
2	Dukungan ATTG bagi Kelompok UPPKS	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah UPPKS yang aktif (kelompok)	12	86,776,300	Pembinaan Kelompok BKL	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah UPPKS yang aktif (kelompok)	12	95,494,400	DAU
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)		Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan kb	80	3,390,175,550	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)		Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan kb		3,606,710,886	DAK
1	Pembangunann Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Balai Penyuluhan (unit)	4	2,000,000,000	Pembangunann Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Balai Penyuluhan	4	1,800,424,244	DAK
2	Pengadaan Mobil antar jemput akseptor KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan Distribusi Alokon (Unit)	1	500,000,000	Pengadaan Kendaraan Distribusi Alokon	Kab. Humbang Hasundutan -	Kendaraan Distribusi Alokon	1	600,000,000	DAK
3	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/ Alat Dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Alat dan Obat Side Efek Kontrasepsi (Unit)	14	161,700,000	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/ Alat Dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Alat dan Obat Side Efek Kontrasepsi	14	161,700,000	DAK

Rencana Kerja (Renja) 2019

4	Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Media KIE Kecamatan (Kali)	10	136,210,500	Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Media KIE Kecamatan	10	136,210,500	DAK
5	Pengadaan IUD KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah IUD KIT (Set)	30	85,050.000	Pengadaan IUD KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah IUD KIT	30	85,050.000	DAK
6	Pengadaan Materi Genre KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Ketersediaan Pengadaan Materi Genre KIT(Set)	30	180,000,000	Pengadaan Materi Genre KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan Materi Genre KIT	30	140,000,000	DAK
7	Pengadaan BKB KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKB KIT(Unit)	33	180,180,000	Pengadaan BKB KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKB KIT	33	180,180,00	DAK
8	Pengadaan Sarana Dan Pendataan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Sarana Pendataan(Unit)	4	132,000,000	Pengadaan Sarana Dan Pendataan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Sarana Pendataan	4	168,291,092	DAK
9	Pengadaan BKL KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKL KIT (Unit)	19	100,000,000	Pengadaan BKL KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKL KIT	19	100,000,000	DAK

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menyatakan bahwa kabupaten/kota merupakan daerah otonom, yaitu daerah yang memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, Peningkatan partisipasi, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada pemberdayaan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Forum Koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrembang kecamatan dengan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Rencana kerja (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraanya difasilitasi oleh SKPD terkait.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program KB Nasional merupakan salah satu program sosial dasar yang tetap mendapat perhatian dan komitmen dari Pemerintah. Dalam RPJM disebutkan bahwa program KB Nasional yang merupakan rangkaian pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas sebagai langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa program KB menjadi salah satu urusan wajib bagi daerah.

Arah kebijakan Program KB Nasional antara lain :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata melalui :
 - a. Pembinaan peserta KB dengan penyediaan alokon terutama PUS Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
 - b. Penurunan disparitas akses dan kualitas pelayanan KB
 - c. Peningkatan peserta KB pria
 - d. Penurunan DO termasuk kegagalan dan komplikasi
 - e. Penguatan advokasi dan KIE KB bagi PUS dan remaja
 - f. Penguatan kelembagaan KB
 - g. Penguatan klinik KB pemerintah dan swasta dengan penyediaan sarana dan prasarana
 - h. Peningkatan kapasitas tenaga lini lapangan KB dan tenaga medis KB, serta IMP/Kader KB
 - i. Pembinaan ketahanan keluarga melalui BKB, BKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB serta meningkatkan KB mandiri.
 - 1) Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB
 - a. Identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan dan KB
 - b. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas dengan menyusun rancangan induk kependudukan baik nasional maupun regional/daerah
 - c. Penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
 - d. Analisis dampak kependudukan
 - e. Peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan
 - 2) Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu

- a. Penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk dan survei kependudukan serta data sektoral bidang KKB
- b. Peningkatan cakupan registrasi vital administrasi kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara RENJA dan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2019 Merupakan tujuan dan sasaran RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tahun 2016-2021, yaitu:

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang diwujudkan adalah:

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Untuk Mencapai Keluarga Kecil, Bahagia Dan Sejahtera.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah Penjabaran tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Humbang Hasundutan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yaitu

1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Dinas.
Indikator Kinerja :
 - Nilai Evaluasi Akip
2. Sasaran : Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
Indikator Kinerja :
 - Rata Rata Jumlah Anak Per – Keluarga
3. Sasaran : Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi
Indikator Kinerja :
 - Persentase CPR(Contracepci Prevalenci Rate)
4. Sasaran : Meningkatkan Pembangunan Keluarga
 - Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan UPPKS

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya menggapai visi dan misi Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan, maka ditetapkan program kegiatan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program keluarga Berencana
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
6. Program pelayanan Kontrasepsi

7. Program Pelayanan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri
8. Program Penyiapan Tenaga Pendampingan Kelompok Bina keluarga
9. Program Peningkatan sarana dan Prasarana KB (DAK)

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakkan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
11. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Keluarga Berencana

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Implementasi Siga

5. Program kesehatan reproduksi remaja

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pembinaan Kelompok PIK R/

6. Program Pelayanan Kontrasepsi

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
2. Pengadaan Alat/obat side efek kontrasepsi
3. Biaya Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi (DAK)
4. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)

7. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPK
2. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
3. Penguatan Komitmen Lintas Sektor Program KKBPK
4. Pembinaan Pencatatan Dan Pelaporan Bagi Petugas R/R Klinik
5. Dukungan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dan Manajemen BOKB
6. Integritas Program KKBPK dan Program Pembangunan Lainnya DiKampung KB
7. Operasional KIE oleh PPKBD dan Sub PPKBD di posyandu (DAK)

8. Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga

Kegiatan yang dilaksanakan

1. Pembinaan Kader Kelompok Ketahanan Keluarga
2. Dukungan ATTG bagi Kelompok UPPKS

9. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pembangunan gedung balai penyuluhan KB (DAK)
2. Pengadaan BKL KIT (DAK)
3. Pengadaan BKB KIT (DAK)
4. Pengadaan Sarana Pendataan (DAK)
5. Pengadaan Materi Genre KIT
6. Pengadaan IUD KIT

Tabel 3.2
Rumusan Rencana dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Humbang Hasundutan

OPD : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	Urusan Pemerintah Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020			
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	80	453,646,239			80	517,167,000	DAU
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi,Air ,Listrik Yang Terpenuhi(Jasa)	2	4,459,000		Dinas P2KB	2	5,309,000	DAU
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Item)	4	6,050,000		Dinas P2KB	4	6,349,000	DAU
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Peralatan Kebersihan Kantor (Item)	23	4,263,620		Dinas P2KB	2	11,648,000	DAU
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor Terdistribusi Sesuai Kebutuhan (Item)	50	40,658,519		Dinas P2KB	50	45,563,000	DAU
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Yang Terpenuhi (Item)	7	29,941,400		Dinas P2KB	7	46,575,000	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Alat Listrik dan Penerangan Kantor Yang Beroperasi Dengan Baik(item)	7	3,753,500		Dinas P2KB	7	4,495,000	DAU
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas P2KB	Jumlah Penyediaan Makan dan minum yang terpenuhi (kebutuhan)	3	19,000,000		Dinas P2KB	3	21,210,000	DAU
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas P2KB	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang terpenuhi (bahan bacaan)	1	29,336,200		Dinas P2KB	1	33,232,000	DAU
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke daerah yang terpenuhi(kali)	134	200,584,000		Dinas P2KB	134	245,300,000	DAU
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dinas P2KB	Jumlah rapat rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam yang terpenuhi(kali)	387	105,200,000		Dinas P2KB	387	163,486,000	DAU
11	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dinas P2KB	Jumlah laporan perangkat daerah (Dokumen)	3	10,400,000		Dinas P2KB	3	16,000,000	DAU
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Dinas P2KB	Persentase Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Yang layak Fungsi (%)	70	127,034,119		Dinas P2KB	80	179,000,000	DAU
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Peralatan Gedung Kantor (Item)	4	35,059,719		Dinas P2KB	4	64,000,000	DAU
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Dinas P2KB	Jumlah Gedung / Kantor yang DiPelihara (Unit)	1	15,000,000		Dinas P2KB	2	45,000,000	DAU
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Dinas P2KB	Jumlah kendaraan dinas yang di pelihara(Unit)	4	76,974,400		Dinas P2KB	2	80,000,000	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

3	Program Peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur		Cakupan Aparatur Perangkat Daerah Ynag Memiliki Kompetensi Di Bidanganya (%)	60	50,000,000			80	82,000,000	DAU
1	Bimbingan Teknis dan Kaji Banding Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas P2KB	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat /Bimtek (orang)	8	50,000,000		Dinas P2KB	8	82,000,000	DAU
4	Program Keluarga Berencana	Dinas P2KB	Rasio Pemahaman Masyarakat tentang isu kependudukan (persen)	60	58,699,800		Dinas P2KB	80	593,077,000	DAU
1	Implementasi Siga	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Data Mikro (KK)	5000	58,699,800		Kab. Humbang Hasundutan	5000	123,000,000	DAU
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kelompok Binaan Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (%)	70	78,455,800		Dinas P2KB	90	69,000,000	DAU
1	Pembinaan Kelompok PIK R/M	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Remaja Yang DiBina (Peseta)	110	78,455,800		Kab. Humbang Hasundutan	110	69,000,000	DAU
6	Program Pelayanan Kontrasepsi		Persentase Peserta KB (%)	67	825,425,700		Dinas P2KB	80	445,000,000	DAU
1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Peserta KB Aktif (pesertas)	1030	300,000,300		Kab. Humbang Hasundutan	1030	385,000,000	DAU
2	Pengadaan alat/obat side effect kontrasepsi	Dinas P2KB	Jumlah dan jenis ketersediaan obat side effek kontrasepsi (Item)	23	48,425,400		Kab. Humbang Hasundutan	23	60,000,000	DAU
3	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Distribusi Alat Dan Obat Kontrepsi Ke Fasyuankes	18	27,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	18	34,000,000	DAU

Rencana Kerja (Renja) 2019

4	Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (Unit)	6	450,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	6	134,000,000	DAU
7	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Mitra Kerja Program KKBPK	90	1,920,850,600		Kab. Humbang Hasundutan	80	1,603,131,200	DAU
1	Penguatan Jejaring Kemitraan Program KKBPK	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Mitra Kerja Program KKBPK yang Terbentuk (Peserta)	100	28,453,300		Kab. Humbang Hasundutan	100	158,053,300	DAU
2	Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program KKBPK	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah OPD yang bersinergitas untuk mendukung percepatan dan pengendalian penduduk (peserta)	200	130,249,000		Kab. Humbang Hasundutan	200	160,324,000	DAU
3	Penguatan Komitmen Lintas Sektor Program KKBPK	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Kecamatan yang menandatangani komitmen untuk mendukung program KKBPK (kali)	10	24,260,400		Kab. Humbang Hasundutan	10	90,085,000	DAU
4	Pembinaan Pencatatan dan Pelaporan Bagi Petugas R/R Klinik	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Fasyankes yang mengikuti pembinaa, pencatatan dan pelaporan R/R (faskes)	18	24,260,400		Kab. Humbang Hasundutan	18	29,260,400	DAU
5	Manajemen BOKB	Kab. Humbang Hasundutan	Persentase Penyerapan BOKB (%)	80	120,379,500		Kab. Humbang Hasundutan	3	140,379,500	DAU
6	Integritas Program KKBPK dan program Pembangunan Lainnya Di Kampung KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kampung KB di Bina(kampung KB)	10	898,400,000		Kab. Humbang Hasundutan	10	990,000,000	DAK
7	Operasional KIE Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kunjungan PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu	308	694,848,000		Kab. Humbang Hasundutan	1 Keg	999,762,000	DAU
8	Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga		Persentase Kader Kelompok Ketahanan Keluarga dan UPPKS yang terlatih dan aktif (%)	90	320,495,100		Kab. Humbang Hasundutan	80	404,523,400	DAK
1	Pembinaan kader Ketahanan Keluarga	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kader Ketahanan keluarga yang terlatih BKB,BKL,BKR (Peserta)	500	233,718,800		Kab. Humbang Hasundutan	500	293,907,400	DAK

Rencana Kerja (Renja) 2019

2	Dukungan ATTG bagi Kelompok UPPKS	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah UPPKS yang aktif (kelompok)	12	86,776,300		Kab. Humbang Hasundutan	12	110,616,000	DAK
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (DAK)	80	3,390,175,550		Kab. Humbang Hasundutan		3,545,720,886	DAK
1	Pembangunann Gedung Balai Penyuluhan KB (DAK)	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Balai Penyuluhan (unit)	4	2,000,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	4	1,999,424,244	DAK
2	Pengadaan Mobil antar jemput akseptor KB	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Kendaraan Distribusi Alokon (Unit)	1	500,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	1	700,000,000	DAK
3	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT/ Alat Dan Obat Kontrasepsi	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Alat dan Obat Side Effek Kontrasepsi (Unit)	14	161,700,000		Kab. Humbang Hasundutan	14	191,700,000	DAK
4	Pembuatan Media KIE untuk Kecamatan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Media KIE Kecamatan (Kali)	10	136,210,500		Kab. Humbang Hasundutan	10	136,210,500	DAK
5	Pengadaan IUD KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah IUD KIT (Set)	30	85,050.000		Kab. Humbang Hasundutan	30	95,050.000	DAK
6	Pengadaan Materi Genre KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Ketersediaan Pengadaan Materi Genre KIT(Set)	30	180,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	1 Keg	160,000,000	DAK
7	Pengadaan BKB KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKB KIT(Unit)	33	180,180,000		Kab. Humbang Hasundutan	1 Keg	190,180,00	DAK
8	Pengadaan Sarana Dan Pendataan	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Sarana Pendataan(Unit)	4	132,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	1 Set	178,291,092	DAK
9	Pengadaan BKL KIT	Kab. Humbang Hasundutan	Jumlah Pengadaan BKL KIT (Unit)	19	100,000,000		Kab. Humbang Hasundutan	20 Unit	120,000,000	DAK

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Indikator Kinerja

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2019 yaitu pencapaian visi dan misi Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka menuju Humbang Hasundutan yang Hebat dan Bermentalitas unggul.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Fokus/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Pada Tahun 2015	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Rata – rata Jumlah Anak Per Keluarga	4,19	4,1	4,05	4,0	3,80	3,80	3,60
2	Kesertaan Ber-KB	28	30	31,50	32,0	32,50	33	34
3	Cakupan PUS yang ingin Ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	12,64	11,57	9,94	8,14	7,50	7	6,50
4	Ketersediaan Grand Design Pembangunan Kependudukan	0	0	0	1	0	0	0

5	Jumlah Pembinaan Kampung KB	0	10	10	15	15	20	10
6	Cakupan Remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja mahasiswa	85	95	100	110	210	220	240
7	Cakupan anggota kelompok BKR yang aktif	82	86	86,5	87,5	88	99	99
8	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) yang Ber-KB	85	87	88	88,4	89	90	92
9	Persentase Kelompok UUPKS yang Aktif Dan Mandiri	70	78	79	80	85	87	89
10	Persentase Pemakaian Kontrasepsi(CPR)	65	66,25	66,75	87,25	68,25	70	71
11	Cakupan anggota bina keluarga Balita (BKB) yang Ber-KB	70	78	79	80	85	87	89

2. Kelompok sasaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan program dan kegiatan rutin yang berhubungan dengan operasional kantor. Sedangkan program dan kegiatan lainnya ditujukan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan yang terdiri dari Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama, Pasangan Usia Subur (PUS), anggota kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, kelompok UPPKS, kelompok PIK R/M, Institusi

Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) dan juga instansi yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

3. Lokasi kegiatan

Jumlah program yang direncanakan untuk Tahun 2018 meliputi 10 (sepuluh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Doloksanggul dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

4. Kebutuhan dana Indikatif dan Sumber Dana

Total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam Renja TA. 2019 ini yaitu sebesar Rp. **8.146.700.313** yang bersumber dari DAK sebesar **Rp 5.578.180.636** dan DAU sebesar **Rp.2.568.519.677**

BAB V

PENUTUP

Ketersediaan anggaran didukung dengan sarana dan prasarana yang baik serta kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pelaksana yang memadai merupakan faktor keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembangunan.

Rencana program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renja Tahun 2019 ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Sebagai tindak lanjut penyusunan Renja ini, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan akan menuangkan program dan kegiatan tersebut dalam penyusunan RKA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan TA. 2019.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2019 ini dibuat dan diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga program dan kegiatan tersebut dapat terselenggara secara terukur, terarah, efektif, dan efisien.



